ABSTRAK

Yovita Serviana Ona Watu, Skripsi 2026 berjudul **"Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur".** Dibimbing oleh Ibu Theny I. B. K. Pah, S.Sos., M.PA dan Belandina L. Long, S.Sos., M.Si.

Penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang berdampak pada faktor kehidupan masyarakat di Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura Kabupaten Flores Timur, dengan tujuan untuk menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Kabupaten Flores Timur dalam menanggulangi bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, menggunakan teori manajemen penanggulangan bencana menurut Soehatman Ramli tahun 2010, pada tahap pra bencana, saat kejadian, dan pasca bencana. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 18 informan dari unsur BPBD dan masyarakat terdampak melalui teknik sampling jenuh dan accidental sampling, serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tahap pra bencana, BPBD melalui peta Rekomendasi Kawasan Rawan Bencana melaksanakan kesiagaan dan mitigasi dengan membentuk Tim Siaga Bencana dan Kampung Siaga Bencana, memberikan sosialisasi, pemasangan poster, hingga pemanfaatan kearifan lokal mampu mengatasi keterbatasan infrastruktur peringatan dini. Namun, minimnya kesadaran masyarakat akibat tuntutan ekonomi, dokumen rencana kontigensi belum diperbarui sejak 2013, lemahnya mitigasi aktif zona merah KRB, dipicu keterbatasan system deteksi dan rambu evakuasi mengakibatkan kepanikan massal dan korban jiwa saat erupsi tak terduga. Saat kejadian, Tim Raeaksi Cepat BPBD berkoordinasi lintas sektor secara tanggap dalam evakuasi korban, penetapan status tanggap darurat, pendirian pos lapangan, dan distribusi logistik. Berlanjutnya masa peralihan darurat menyebabkan ketidaknyamanan pengungsi relokasi Hunian sementara (Huntara) dan mandiri, terutama permasalahan kebutuhan vital pengungsi Huntara. Pada tahap pascabencana, BPBD melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pemulihan akses transportasi, trauma healing, dan Pembangunan program Hunian tetap (Huntap) melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Akan tetapi keterbatasan pendanaan, keterlambatan pengajuan dokumen R3P, besarnya kapasitas rekonstruksi Huntap mencakup 5 sektor penting, menjadi tantangan karena membutuhkan waktu, proses dan perencanaan matang dalam pemulihan. Oleh karena itu, BPBD Flores Timur perlu penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi, sistem peringatan dini dan komunikasi bencana, partisipasi aktif Masyarakat serta percepatan program pemulihan.

Kata Kunci: BPBD, Penanggulangan Bencana, Erupsi Gunung Api, Lewotobi Laki-Laki, Flores Timur.

ABSTRACT

Yovita Serviana Ona Watu, 2026 Thesis entitled **"The Role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in Managing the Disaster of the Mount lewotobi Laki-Laki Eruption in Wulanggitang and Ile Bura Districts, East Flores Regency".** Supervised by Theny I. B. K. Pah, S.Sos., M.PA and Belandina L. Long, S.Sos., M.Si.

This study addresses the eruption of Mount Lewotobi Laki-Laki and its impact on the lives of communities in the Wulanggitang and Ile Bura Districts of East Flores Regency. It aims to analyze the role of the East Flores Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD) in managing the disaster, applying Soehatman Ramli's (2010) disaster management theory across the pre-disaster, during-disaster, and post-disaster stages. A descriptive qualitative method was employed, involving 18 informants comprising BPBD personnel and affected community members selected through saturated and accidental sampling techniques; data collection involved observation, interviews, and documentation. Research findings indicate that during the pre-disaster stage, BPBD utilized Disaster-Prone Area (KRB) recommendation maps to implement preparedness and mitigation measures. These included establishing Disaster Preparedness Teams and Disaster Preparedness Villages, conducting public outreach, installing posters, and leveraging local wisdom to overcome limitations in early warning infrastructure. However, issues such as low public awareness driven by economic pressures, outdated contingency plans (not revised since 2013), weak active mitigation in red zones, and inadequate detection systems and evacuation signage led to mass panic and casualties during unexpected eruptions. During the event, BPBD's Rapid Response Team coordinated effectively across sectors to evacuate victims, declare an emergency response status, establish field posts, and distribute logistics. The prolonged emergency transition period caused discomfort for displaced persons whether in temporary shelters (Huntara) or self-arranged housing particularly regarding the vital needs of those in temporary shelters. In the post-disaster stage, BPBD carried out rehabilitation and reconstruction efforts, including restoring transportation access, providing trauma healing, and developing permanent housing (Huntap) programs guided by the Post-Disaster Rehabilitation and Reconstruction Plan (R3P). However, challenges persisted, including funding limitations, delays in submitting R3P documentation, and the extensive scope of the permanent housing reconstruction program. As a critical sector, it presents a challenge because recovery requires time, specific processes, and careful planning. Therefore, the East Flores Regional Disaster Management Agency (BPBD) needs to strengthen its institutional capacity and improve coordination, early warning and disaster communication systems, and community participation, while also accelerating recovery programs.

Keywords: BPBD, Disaster Management, Volcanic Eruption, Mount Lewotobi Laki-Laki, East Flores Regency.

DAFTAR ISI

SKRIPSI i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI iii
PERNYATAAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 14
1.3. Tujuan Penelitian 14
1.4. Manfaat Penelitian 14
BAB II 16
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 16
2.1. Penelitian Terdahulu 16

2.2. Landasan Teori 18
2.2.1. Peran 19
2.2.2. Peran Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) 21
2.2.3. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 24
2.2.4. Tahapan manajemen Bencana 26
2.2.5. Bencana Erupsi Gunung Berapi 31
2.2.6. Dampak Bencana Erupsi Gunung Berapi 33
2.3. Kerangka Berpikir 35
BAB III 37
METODE PENELITIAN 37
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 37
3.2. Lokasi Penelitian 37
3.3. Fokus, Definisi Operasional, dan Fokus Penelitian 38
3.4. Teknik Penentuan Informan 38
3.5. Sumber Data 39
3.6. Prosedur Pengumpulan Data 40
3.7. Analisis Data 41
3.8. Teknik Keabsahan Data 41
BAB IV 43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43
4.1. Deskripsi Obyek Penelitian 43
4.1.1 Gambaran umum Lokasi Bencana Gunung Api Lewotobi Laki-Laki . 43

4.1.2 Profil Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura 46
4.1.3 Deskripsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur 50
4.2. Peran BPBD Kabupaten Flores Timur Dalam Menanggulangi Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki Di Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura 65
4.2.1 Pra Bencana 65
4.2.2 Saat Kejadian Bencana 79
4.2.3 Pasca Bencana 90
BAB V 103
PENUTUP 103
5.1. Kesimpulan 103
5.2. Saran 108
DAFTAR PUSTAKA 111
CATATAN 115
DAFTAR LAMPIRAN 116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 121

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Kondisi Geologi dan Morfologi Kabupaten Flores Timur. 4

Tabel 1. 2 Kronologi Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki tahun 2023-2025. 5

Tabel 1. 3 Kerusakan pada Sektor Perumahan dan Jalan Lingkungan Setapak..... 7

Tabel 1. 4 Kerusakan Sektor Ekonomi. 8

Tabel 1. 5 Kerusakan Sektor Sosial di Wilayah terdampak. 8

Tabel 1. 6 Kerusakan Lintas Sektor di Wilayah Terdampak. 9

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 16

Tabel 3. 1 Fokus, definisi operasional, dan sub fokus penelitian. 38

Tabel 3. 2 Informan Penelitian. 39

Tabel 4. 1 Jumlah Desa, Luas, dan Ketinggian wilayah (mdpl) di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura. 48

Tabel 4. 2 Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering..... 62

Tabel 4. 3 Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan dan Kepangkatan……62

Tabel 4. 4 Jumlah Sumber Daya Manusia BPBD Kabupaten Flores Timur..... 63

Tabel 4. 5 Data Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Flores……..….64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berpikir……..36
Gambar 4. 1 Peta Lokasi Gunung Api Lewotobi di Kabupaten Flores Timur 43
Gambar 4. 2 Sejarah Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki 45
Gambar 4. 3 Peta Rekomendasi Wilayah/Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi Lewotobi Laki-Laki..... 49
Gambar 4.4. Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Flores Timur.....52
Gambar 4.5. Peta Bahaya Letusan Gunung Api di Kabupaten Flores Timur.....68
Gambar 4.6. Pemasangan poster dan kegiatan sosialisasi Siaga Bencana.....68
Gambar 4.7. Media informasi peringatan dini WA Grup Salam Tangguh Bencana BPBD Flores Timur.....75
Gambar 4.8.Alur Sistem Peringatan Dini Bencana dari pemerintah ke masyarakat.....75
Gambar 4.9. Penyelamatan, evakuasi korban dan pembangunan tenda pengungsi.....81
Gambar 4.10.Pendistribusian Logistik.....87
Gambar 4.11. Sarana dan Prasarana BPBD 87
Gambar 4.12. Upaya Rehabilitasi Pemulihan Jalan dan Sosial Psikologis Masyarakat.....94
Gambar 4.13. Rekonstruksi Bangunan Huntap tahun 2026.....98
Gambar 4.12. Kerja sama BPBD masyarakat membangun selokan air upaya penanganan banjir di beberapa titik.....98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian 116

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas 117

Lampiran 3 Surat Izin penelitian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 118

Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian Pelayanan Terpadu Satu Pintu 119

Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Badan Penanggulangan .. 120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan tingkat resiko bencana alam cukup tinggi karena berada di urutan ke-38 dari 181 negara di dunia (Tsabita, 2024). Menurut Warsito et al. (2021), juga tercantum dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana alam adalah serangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan pengaruhi kehidupan dan penghidupan manusia. Sebagai negara kepulauan luasnya ± 1,905 juta km², terletak di garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua (Asia & Australia) dan dua samudera (Pasifik & Hindia) posisi strategis ini menjadikannya kaya akan sumber daya alam, sekaligus rentan terhadap bencana alam yang kompleks seperti gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami (Deby et al., 2019). Studi oleh (Purnomo & Utomo, 2008) menunjukkan bahwa sekitar 87% wilayah Indonesia terancam bencana alam.

Sebanyak dari 440 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, terdapat 383 Kabupaten/Kota berisiko tinggi (Zagarino et al., 2021). Karena letak geografis Indonesia berada di jalur Cincin Api Pasifik *"Ring of Fire"* terpanjang di dunia, maka sekitar 13% sebagai negara pemilik gunung api terbanyak, dengan lebih dari 500 gunung api, 130 di antaranya aktif, ini menyebabkan sebagian wilayah seringkali mengalami erupsi dan aktivitas seismik (Siregar & Rogi, 2020).

Letusan gunung api merupakan fenomena alam vulkanik disertai aktivitas seismik yang tidak dapat dihindari bahkan terkadang sulit diprediksi (Tsabita, 2024). Erupsi gunung api sebagai proses keluarnya magma dan gas dari dalam bumi ke permukaan, atau bahkan menghasilkan material lepas dan lelehan lava (Ruslanjari, 2017). Erupsi sewaktu-waktu terjadi dan berdampak luas, yakni kerusakan lingkungan, kerugian materi, gangguan psikologis, hingga berisiko hilangnya nyawa manusia (Dede et al., 2019).

Mengingat potensi bencana letusan gunung api yang kompleks di sebagian wilayah Indonesia, serta dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat (publik) maka, pentingnya upaya penangulangan untuk mengatasi masalah bencana secara lebih baik dan tersistematis (Fitriani et al, 2021). Menurut Hayati Nimah, et al. (2022) manajemen bencana "*Disaster Management"* adalah sebuah proses terpadu, berkesinambungan, serta dinamis dalam meningkatkan kualitas peran sekaligus upaya terkait observasi dan analisis penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah 3 (tiga) serangkaian tahapan meliputi, pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana (Republik, 2007).

Menurut Soehatman Ramli (2010) setiap tahapan penanggulangan merupakan proses terencana baik masa pra bencana melalui (kesiagaan & peringatan dini), saat kejadian bencana (tanggap darurat & penanggulangan logistik), dan pasca bencana melalui kegiatan (rehabilitasi & rekonstruksi). Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan secara terencana dan terkoordinasi bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat,

mengurangi ancaman, resiko, serta dampak bencana (Republik Indonesia, 2008).

Dalam struktur pemerintahan, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan dalam merespon masalah bencana dan mengatasi berbagai persoalan penanggulangan bencana di Indonesia, tertera dalam peraturan perundang-undangan dan program penanggulangan bencana. Kebijakan nasional penanggulangan bencana yakni Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Nurjanah, et al. 2013:98).

Pemerintah juga hadir sebagai aktor utama yang mempunyai kuasa sekaligus penanggung jawab dalam penanggulangan bencana, secara khusus berada di tangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat (Rusna, 2018). Terkait kebijakan penanggulangan bencana, BNPB berstatus sebagai Lembaga Non-departemen setingkat Menteri, sedangkan BPBD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembentukan BPBD berdasarkan ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan diberi amanat untuk menanggulangi bencana di wilayahnya (Christwin, 2021).

Kabupaten Flores Timur, salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada dalam seismik aktif Indonesia sehingga sangat rentan terhadap aktivitas erupsi dan gempa vulkanik. Menurut data kondisi geologi dan morfologi Kabupaten Flores Timur terdapat 4 (empat) gunung api aktif disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1. Kondisi Geologi dan Morfologi Kabupaten Flores Timur.

No	Nama Gunung	Ketinggian meter (m)	Lokasi
1	Lewotobi Laki-Laki	1.584	Kec. Wulanggitang dan Ile Bura
2	Lewotobi Perempuan	1.703	Kec. Wulanggitang dan Ile Bura
3	Leraboleng	1.117	Kec. Demon Panggung
4	Ileboleng	1.659	Kec. Ile Boleng

Sumber: Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Flores Timur 2026.

Tabel 1.1. Menunjukan bahwa secara geologis, keberadaan empat gunung api aktif dalam satu wilayah administratif menunjukkan ancaman erupsi signifikan di Kabupaten Flores Timur. Dari empat gunung api tersebut, yang ingin peneliti kaji adalah Lewotobi Laki-Laki dikarenakan fenomena erupsi berupa magma dan material vulkanik yang naik ke permukaan dan berdampak luas bagi masyarakat setempat di Kecamatan Wulanggitang dan sebagian kecil Kecamatan Ile Bura.

Gunung api Lewotobi Laki-Laki, mulai mengalami gejala erupsi pada 17 Desember 2023, berlanjut keawal tahun 2024 hingga pertengahan tahun mengalami peningkatan dan penurunan aktivitas vulkanik, selanjutnya mencapai puncak erupsi pada tanggal 03 November 2024, dan mengalami pasca erupsi di pertengahan tahun 2025. Untuk lebih jelas kronologi gejala,

aktivitas erupsi, penentuan status, dan dampak erupsi Lewotobi Laki-Laki, disajikan pada tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1. 2 Kronologi Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki tahun 2023-2025.

Tahun	Jumlah	Status PVMBG	Jenis Erupsi	Dampak	Lokasi Terdampak
2023	4 kali	Level I (normal) menjadi Level II (waspada)	Gemuruh, gempa dan abu vulkanik	Mencemari lingkungan hidup masyarakat	Kecamatan Wulanggitang & Ile Bura
2024	872 kali	Level II (waspada), Level III (siaga), menjadi Level IV (awas erupsi)	abu vulkanik tebal, lontaran batu pijar, aliran lahar panas dan hujan pasir.	9-10 jiwa meninggal dunia	Desa Klatanlo
				63 orang luka-luka	Desa Dulipali, Klatanlo dan Hokeng Jaya
				4.436 orang mengungsi	Desa Klatanlo, Nawakote, Boru, Hokeng Jaya, Nobo, Dulipali, Pululera, dan Boru Kedang
2025	236 kali	Level IV (awas erupsi), Level III (siaga)	Abu vulkanik, disertai hujan kerikil, petir, dan suara gemuruh	7.960 masyarakat mengungsi	Desa Klatanlo, Nawakote, Boru, Hokeng Jaya, Nobo, dan Dulipali.

Sumber: Lembaga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), dan BPBD Flores Timur, tahun 2026.

Pada awal Desember 2023, gejala arupsi pertama kali berupa aktivitas gemuruh dan gempa vulkanik, kemudian pada tanggal 17 Desember 2023 pukul 12:00 WITA, lembaga PVMBG resmi menetapkan dan menaikan status dari level I (normal) menjadi level II (waspada). Penentuan status dikarenakan erupsi mulai menghasilkan abu vulkanik, berupa gas, pasir atau debu belerang, yang berpengaruh pada lingkungan hidup masyarakat di hampir seluruh wilayah Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura. Masalah yang dihadapi berupa pencemaran air bersih, pencemaran udara, tanaman dan perkebunan masyarakat, selain itu material vulkanik juga mulai menimbun jalan dan merusak atap rumah warga (BNPB, 2024).

Kemudin awal tahun 2024, Lewotobi Laki-Laki kembali mengalami serangkaian gejala erupsi, dan berdasarkan laporan PVMBG penentuan status hasil pengamat gunung api pada 01 Januari 2024 pukul 00.03 WITA terjadi peningkatan gempa tremor dan aktivitas erupsi maka pukul 04.00 WITA status naik dari level II (waspada) ke level III (siaga). Karena terus mengalami peningkatan, maka pada 09 Januari 2024 terjadi perubahan status dari level III (siaga) ke level IV (awas) bencana. Namun ditanggal 29 Januari 2024, terjadi penurunan status dari level IV (awas) ke level III (siaga), kemudian tanggal 01 Maret 2024 terus mengalami penurunan status ke level II (waspada) dan kondisi ini bertahan selama 3 bulan. Kemudian, pada tanggal 10 Juni 2024 karena aktivitas gunung meningkat cukup signifikan maka, status naik dari level II (waspada) ke level III (siaga).

Selanjutnya, pada puncak kejadian erupsi tanggal 03 November 2024 menghasilkan abu vulkanik tebal, lontaran batu pijar, aliran lahar panas dan hujan pasir. Menurut data BNPB (2024), pada 06 November 2024 tercatat 9-10 orang meninggal dunia dari Desa Klatanlo, sedangkan 63 orang mengalami luka berasal dari 3 desa terdampak yakni Klatanlo, Dulipali dan Desa Hokeng Jaya, sementara itu sebanyak 4.436 orang mengungsi. Sesuai data BPBD tahun (2024), tercatat bahwa wilayah terdampak gejala erupsi terdiri dari 8 desa yakni, Pululera, Nawokote, Hokeng Jaya, Klatanlo, Boru, dan Boru Kedang berlokasi di Kecamatan Wulanggitang, serta Dulipali dan Nobo di Kecamatan Ile Bura.

Berdasarkan keterangan PVMBG, hal ini disebabkan perubahan aktivitas vulkanik yang tidak menentu yang mana saat erupsi tak terduga status gunung saat itu masih berada pada level III (Siaga) yang seharusnya pada Level IV (awas). Kemudian setelah kejadian berdasarkan surat kepala PVMBG No.95.1.Lap/GL.03/BGV/2024, tingkat aktivitas barulah dinaikan menjadi level IV (awas) terhitung sejak tanggal kejadian erupsi 03 November 2024 pukul 24.00 WITA.

Berdasarkan data BPBD Flores Timur, pada hasil kajian kerusakan dan kerugian pasca erupsi tanggal 03 November 2024, berpengaruh pada 5 sektor penting bagi masyarakat khusunya 8 desa terdampak di Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura. Pertama pada sektor hunian berdampak pada perumahan, permukiman dan jalan lingkungan atau setapak, menyebabkan masyarakat mengungsi karena kehilangan tempat tinggal mereka. Kerusakan sektor hunian penulis sajikan pada Tabel 1.3 sebagai berikut.

Tabel 1. 3 Kerusakan pada Sektor Perumahan dan Jalan Lingkungan Setapak.

No	Kecamatan	Desa	Kerusakan Hunian (Unit)			Total (Unit)	Kerusakan Lingkungan setapak			Total (M^2)
			Berat	Sedang	Ringan		Berat	Sedang	Ringan	
1	Wulanggitang	Boru	369		401	770		1.700		1.700
		Boru Kedang			280	280		1.200		1.200
		Hewa								
		Hokeng jaya	457			457		3.200		3.200
		Klatanlo						800		800
		Nawakote	399			399		1.000		1.000
		Nileknoheng								
		Ojan Detun								
		Pantai Oa								
		Pululera			360	360		800		800
		Waiula								
2	Ile Bura	Lewotobi								
		Dulipali	223			223		500		500
		Lewoawang								
		Nobo	415			415		500		500
		Nurabelen								
		Riangrita								
		Riangbaring								
Jumlah			**1863**		**1041**	**2904**		**9.700**		**9.700**

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2026.

Kedua pada sektor infrastruktur, kerusakan melumpuhkan sistem layanan dasar dengan total kerugian terdiri dari transportasi darat, pos dan telekomunikasi, air dan sanitasi. Pada sub sektor transportasi, pasca erupsi berdampak pada rusaknya sejumlah ruas jalan baik itu jalan nasional, jalan kabupaten maupun ruas jalan desa, mengakibatkan mobilitas terhambat. Selanjutnya pada sub sektor pos telekomunikasi menimbulkan kerusakan pada bangunan gedung kantor pos Boru. Sementara itu pada sub sektor air dan sanitasi, kerusakan terjadi pada sarana air bersih seperti sambungan rumah dan pipa distribusi serta pada sub sektor sumber daya air kerusakan pada daerah irigasi.

Pada sektor ekonomi, bencana erupsi menyebabkan kerusakan lahan pertanian dan perkebunan, serta sub sektor perikanan dan pertenakan. Kerugian cukup besar pada sektor ekonomi menghilangkan sumber penghidupan utama masyarakat dapat dirincikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1. 4 Kerusakan Sektor Ekonomi.

No	Jenis Sub Sektor Ekonomi	Kerusakan			
		Berat	Sedang	Ringan	Total
1	Sub Sektor Pertanian (M²)				
a.	Tanaman Pangan	2.660,770 M²	2.432 M²	1,827 M²	2.662,597 M²
b.	Hortikultura				
c.	Perkebunan	1.232.600 M²			1.232.600 M²
d.	Kebun Dinas Tuakwiki	20.000 M²		90 M²	20.000 M²
e.	Ketahanan Pangan				
F	Bangunan Poskeswan			90 M²	90 M²
2	Sub Sektor Perikanan(unit)	12 Unit		4 Unit	16 Unit
3	Sub Sektor Peternakan(unit)	23 Unit			23 Unit

Sumber: Data Sekunder BPBD Kabupaten Flores Timur, Tahun 2026.

Pada sektor sosial, berpengaruh pada sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, dan keagaamaan, mengakibatkan terhentinya pelayanan publik. Kerusakan dan kerugian mencakup prasarana fisik berupa gedung beserta sarana pendukung lainya, dapat dirincikan pada Tabel 1.5 dibawah ini.

Tabel 1. 5 Kerusakan Sektor Sosial di Wilayah terdampak.

Jenis Sektor	Jenis Sub sektor	Kerusakan (Unit)			Total
		Berat	Sedang	Ringan	
Kesehatan	Posyandu		21		21
	Puskesmas pembantu	1	1	1	3
	Puskesmas	1			1
	Klinik		1		1
	Poskesdes/Polindes		6	1	7
Total		**2**	**29**	**2**	**33**
Pendidikan	PAUD/TK	31	2	5	38
	SD	41	1	14	56
	SMP	25			25
	SMA/SMK		10	36	46
Total		**97**	**13**	**55**	**165**
Keagamaan	Masjid/ Mushola			1	1
	Gereja Katolik/ Kapela	3	2	5	10
	Gereja Protestan GMIT Ebenhaezer Boru	1			1
Total		**4**	**2**	**6**	**12**

Sumber: Dinas Kesehatan, Dinas PKO Kabupaten Flores Timur, Tahun 2026.

Sementara pada lintas sektor, kerusakan pada sumber mata air, fasilitas pemerintah, dan keamanan, semakin memperparah kondisi pelayanan publik masyarakat terdampak, dapat dirincikan pada Tabel 1.6 sebagai berikut.

Tabel 1. 6 Kerusakan Lintas Sektor di Wilayah Terdampak.

No	Jenis Lintas Sektor	Kerusakan			Total
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Lingkungan Hidup sumber/titik mata air	6			6
2	Pemerintah				
	a. Kantor Camat Wulanggitang	1			1
	b. Rumah Dinas Camat Wulanggitang	2	1		3
	c. UPT Bappenda	2			2
	d. UPTD PLKB	1			1
3	Ketertiban dan Keamanan				
	a. Bangunan Polsek Wulanggitang	1			1
	b. Bangunan Kantor Koramil Boru	1			1
Total Lintas Sektor		**14**	**1**		**15**

Sumber; Bagian Pemerintahan pada setda Kabupaten Flores Timur, Tahun 2026.

Data terkahir pada tahun 2025, Lewotobi Laki-Laki kembali menyoroti publik akibat serangkaian letusan, dengan ketinggian kolom abu 2.500 *m* dari puncaknya. Hasil pengamatan lembaga PVMBG menunjukkan adanya aktivitas seismik dan vulkanik. Menurut BPBD Kabupaten Flores Timur tahun 2025, data terakhir menunjukan total masyarakat pengungsi meningkat sebanyak 7.960 jiwa berasal dari 6 desa yakni, Desa Klatanlo,

Nawakote, Boru, Hokeng Jaya, Nobo, dan Dulipali. Wilayah terdampak harus segera dikosongkan sebab adanya potensi erupsi susulan di tahun 2025.

Sedangkan untuk 2 desa terdampak yakni Pululera dan Boru Kedang tetap menetap dan diberi Dana Stimulan karena kerusakan ringan tidak seperti 6 desa terdampak dengan Hunian tergolong rusak berat dan merupakan wilayah jalur merah erupsi. Data terakhir PVMBG, mencatat pada tanggal 17 Juni 2025 status Lewotobi Laki-Laki pada level IV dengan erupsi terbesar dalam dua dekade terakhir menghasilkan kolom abu, disertai hujan kerikil, petir, dan suara gemuruh.

Kajian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan, melihat berbagai dampak kerusakan, kerugian yang ditimbulkan, dan bencana erupsi gunung api yang terus berlanjut dengan status tanggap darurat hingga akhir tahun 2025. Data terakhir BPBD tahun 2025 tercatat 7.960 jiwa atau 2.277 KK masyarakat terdampak yang sangat membutuhkan penanganan dari pemerintah khusunya BPBD Flores Timur. Terlebih lagi setelah kejadian bencana adanya potensi banjir, lahar dingin pada musim hujan, dan berdampak pada psikososial masyarakat (DetikBali, 2025).

Dalam konteks tersebut, BPBD Flores Timur sebagai lembaga pemerintah daerah dibentuk khusus untuk menangani permasalahan bencana di wilayahnya. Terutama berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 3 Tahun 2022, secara khusus sudah mengatur tentang peran, tugas pokok dan fungsinya dalam penanggulangan bencana dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, efisiensi, dan efektivitas tata kelola

pemerintahan (Comission, 2022). Oleh karena itu, BPBD Flores Timur memiliki mandat melaksanakan penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, saat kejadian bencana, dan pasca bencana. Tugas tersebut meliputi:

1. Pra Bencana

Pra bencana adalah tindakan yang dilakukan BPBD saat situasi tidak terjadi bencana atau potensi terjadinya bencana. Upaya dilakukan meliputi:

a. Kesiagaan

Kesiagaan dilakukan BPBD untuk memastikan upaya pencegahan yang tepat dalam menghadapi bencana seperti identifikasi pengenalan terhadap sumber bahaya dan ancaman bencana, pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan manajemen bencana, serta geladi mekanisme tanggap darurat. BPBD juga melakukan mitigasi pasif seperti pembuatan peta rawan bencana, pembuatan brosur/poster/pamphlet, analisis risiko bencana, pembentukan satuan gugus tugas bencana, serta unit sosial masyarakat. Sedangkan mitigasi aktif yaitu pembuatan tanda bahaya, larangan rawan bencana, perencanaan penampungan sementara, jalur evakuasi, serta pemindahan penduduk dari daerah rawan ke daerah aman bencana.

b. Peringatan Dini

Peringatan dini dilakukan BPBD untuk memberi peringatan segera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana oleh lembaga berwenang melalui pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan pihak berwenang dan penyebarluasan informasi peringatan bencana.

2. Saat Kejadian

Saat terjadi bencana tugas BPBD meliputi tanggap darurat dan pendistribusian logistik kepada masyarakat.

a. Tanggap Darurat

Tanggap darurat upaya BPBD meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.

b. Penanggulangan Logistik

Sedangkan Penanggulangan Logistik BPBD melakukan upaya pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana.

3. Pasca Bencana

Setelah terjadi bencana dan selesainya masa tanggap darurat tugas BPBD berupaya melakukan pemulihan melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

a. Rehabilitasi

Tugas BPBD untuk mengembalikan kondisi daerah pasca bencana serba tidak menentu ke kondisi normal, agar kehidupan dan penghidupan dapat berjalan kembali. Meliputi perbaikan lingkungan daerah pasca bencana, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan psikologis, fungsi pelayanan publik, sosial dan ekonomi.

b. Rekonstruksi

Sedangkan Rekonstruksi tugas BPBD berkoordinasi membangun kembali semua sarana prasaannya dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana, penggunaan peralatan dan penerapan rancang bangunan baik, tepat dan tahan bencana, serta peningkatan fungsi pelayan publik masyarakat.

Namun demikian, BPBD Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti sifat bencana alam erupsi yang sulit diprediksi atau deteksi, minimnya kesiagaan dan pengetahuan masyarakat terkait bencana, sarana prasarana belum memadai, koordinasi antarinstansi, serta sumber daya BPBD Kabupaten Flores Timur yang masih terbatas.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana peran BPBD Kabupaten Flores Timur dalam menanggulangi masalah bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura. Oleh kerena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menangulangi Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur"**.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menangulangi Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menangulangi Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini yaitu:

1) Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam mengembangkan ilmu sosial dan ilmu politik khususnya dalam Ilmu Pemerintahan tentang Penangulangan Bencana. Sebagai tahap pengembangan kemampuan berpikir ilmiah dan sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata I (Satu) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembanding, pertimbangan, dan pengembangan bagi peneliti selanjutnya terkait Penanggulangan Bencana di daerah Kabupaten Flores Timur Maupun bagi daerah lain yang memiliki karakteristik kebencanaan serupa.

2) Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran dan masukan untuk merumuskan kebijakan penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Api di Kabupaten Flores Timur.

b. Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengharapkan penelitian-penelitian terdahulu dapat menjadi tolak ukur dan acuan dalam penelitian ini. Kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu membantu peneliti menetapkan langkah-langkah sistematis dalam menyusun penelitian ini. Secara khusus, penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dikaji merupakan data pendukung yang perlu dijadikan sebagai fondasi atau referensi dalam penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Tahap Pra Bencana Erupsi Gunung Merapi (Studi di Kawasan Rawan Bencana III Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten) Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Volume 4, Nomor 1, 2024 Halaman 195-206 E-ISSN 2798-5326 (Eriska Nahda Tsabita, 2024).	Peran BPBD dalam Tahap Pra Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kawasan Rawan Bencana III Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten menurut Siagian (2013) sudah terlaksana meskipun belum optimal. Peran BPBD sebagai inovator masih perlu dilakukan perbaikan mengingat kebutuhan masyarakat dalam menghadapi ancaman erupsi Gunung Merapi yang beragam. Selanjutnya perbaikan jalur evakuasi saat terjadi bencana sehingga, diharapkan proses evakuasi dapat berlangsung secara cepat.	Metode penelitian yang digunakan sama yaitu deskriptif kualitatif.	Jurnal terdahulu menganalisis peran BPBD menggunakan teori Dimensi Peran (selaku stabilisator, inovator, pelopor, modernisator, dan pelakasana) menurut Siagian tahun 2013, sedangkan penelitian ini menggunakan teori Ramli (2010). Lokasi penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Klaten, sementara penelitian ini dilakukan di Kabupaten Flores Timur.

2.	Analisis Manajemen Mitigasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Terhadap Bencana Alam Erupsi Gunung Tangkuban Perahu Di Jawa Barat. JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 5 No. 1 (Fitriani et al., 2021)	Pencegahan dan pemulihan bencana di Indonesia merupakan salah satu sektor terpenting agar, kerugian yang timbul akibat bencana tidak menghambat pembangunan dan kemajuan nasional. Tujuan penelitian untuk melakukan kajian tentang penanganan letusan mitigasi bencana alam di Gunung Tangkuban Parahu agar mampu mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, pada intinya secara kualitatif dapat memberikan gambaran yang lebih efektif dan efisien. Salah satu upaya pemerintah daerah di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat adalah mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.	Persamaan terletak pada penanggulangan bencana erupsi gunung merapi di daerah oleh BPBD. Metode penelitian yang digunakan sama yaitu kualitatif	Penelitian terdahulu berlokasi di Provinsi Jawa Barat, sedangkan penelitian ini di Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT. Penelitian sebelumnya fokus Menganalisis manajemen mitigasi penangulangan bencana, sedangkan fokus penelitian ini pada manajemen penanggulangan bencana mulai dari Pra Bencana hingga Pasca Bencana. Mengunakan kajian literatur Manajemen Resiko Bencana menurut syarief dan Kondoatie tahun 2006, sedangkan penelitian ini mengunakan Teori Penanggulangan bencana menurut Soehatman Ramli (2010).
3.	Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Sinjai (Bathiar, 2018).	Hasil penelitian bahwa peran BPBD Dalam menanggulangi resiko bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sinjai, bisa dikategorikan baik, karena berdasarkan hasil penuturan dari masyarakat yang menjadi korban bencana tanah longsor itu sendiri merasakan program-program yang telah pemerintah laksanakan	Metode yang digunakan sama yaitu deskriptif kualitatif Persamaan berikutnya terletak pada penanggulangan bencana di daerah oleh BPBD	Penelitian sebelumnya berfokus pada penanggulangan resiko bencana Tanah longsor sedangkan penelitian ini berfokus pada penyelenggaraan penanggulangan bencana erupsi gunung.

		serta kesiapsiagaan yang sangat intesif dilakukan dengan baik sebelum terjadi tanah longsor.		Perbedaan terletak pada tempat dan lokasi penelitian
4.	Manajemen Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanngulangi Banjir di Kota Semarang. Home/ Volume 7, Nomor 2, Tahun 2018 / Mahardika (Mahardika & Larasati, 2018).	Hasil penelitian menunjukkan tahapan penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD Kota Semarang dimulai dari pra bencana masih terdapat kekurangan belum terbentuknya rencana kontinjensi, pada tahap terjadi bencana masih kurangnya logistik dan personil tanggap darurat bencana, dan tahap terakhir yaitu pasca bencana juga masih terdapat kekurangan	Terletak pada penanggulangan bencana oleh BPBD secara menyeluruh baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana. Menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif.	Penelitian sebelumnya menangulangi bencana banjir sedangkan penelitian ini menangulangi bencana erupsi gunung api. Perbedaan lainyanya terletak pada tempat dan lokasi penelitian.
5.	Manajemen Bencana Yang Dilakukan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende Christwin (Yesyuruni, 2021).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada daerah yang belum memiliki rambu-rambu bencana. BPBD melakukan penyuluhan kepada masyarakat, sebelum dan sesudah, BPBD memasang rambu-rambu peringatan bencana sesuai program yang telah ditetapkan. BPBD juga melakukan pelatihan simulasi dan siaga bencana untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dari dampak bencana. BPBD belum memiliki fasilitas yang memadai namun fasilitas yang ada sudah bisa mengakomodir permasalahan bencana yang terjadi. BPBD juga turun langsung untuk mendata kerugian dan memberikan bantuan kepada korban bencana.	Menggunakan metode penelitian yang sama yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian terdahulu juga berfokus pada penanggulangan secara menyeluruh oleh BPBD dari tahap pra bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana.	Lokasi penelitian terdahulu di Kantor BPBD Kabupaten Ende, sedangkan penelitian ini di Kantor BPBD Flores Timur. Landasan teori penelitian terdahulu menggunakan peraturan kepala BNPB No. 4 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan penanggulangan bencana, sedangkan penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2022 tentang tugas dan fungsi BPBD dalam penanggulangan bencana.

Sumber: Review Penulis, tahun 2026.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Peran

Menurut Soekanto (2002), mengartikan peran sebagai komponen aktif kedudukan atau status sosial seseorang. Menurutnya, apabila seorang individu melaksanakan hak dan tanggung jawab yang berkaitan dengan statusnya di masyarakat, berarti orang tersebut telah melaksanakan fungsi atau peran. Seorang individu dapat dikatakan telah melaksanakan fungsinya dalam struktur sosial apabila memenuhi tanggung jawab yang melekat pada kedudukannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai sekumpulan perilaku yang diharapkan dari individu yang memiliki kedudukan tertentu dalam struktur masyarakat.

Peran dalam ungkapan lebih ringkas, dapat dipahami sebagai tindakan atau sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang sesuai dengan status atau kedudukannya dalam lingkungan sosial. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan fungsi dan wewenang yang berpengaruh terhadap suatu peristiwa dan dengan tanggung jawab fungsional yang melekat pada seseorang atau lembaga berdasarkan kedudukannya. Selain itu menurut Dacosta (2022), peran juga merupakan faktor krusial yang berperan sebagai unsur pengendali atau pemimpin dalam proses terjadinya berbagai peristiwa atau situasi dalam masyarakat.

Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan. Identitas peran, terdapat

sikap tertentu dan perilaku aktual yang konsisten dengan sebuah peran, dan yang menimbulkan identitas peran *(role identify).* Orang memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan perubahan besar.

1. Persepsi Peran

   Pandangan kita mengenai bagaimana kita seharusnya bertindak dalam situasi tertentu adalah persepsi peran *(role perception).* Berdasarkan pada sebuah interpretasi atas apa yang kita yakini mengenai bagaimana seharusnya kita berperilaku, kita terlibat dalam jenis-jenis perilaku tertentu

2. Ekspektasi Peran

   Ekspektasi peran *(role expectation)* didefinisikan sebagai apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana anda harus bertindak dalam suatu situasi. Bagaimana anda berperilaku sebagian besar ditentukan oleh peran yang dimaksud yaitu dalam konteks dimana anda bertindak.

3. Konflik Peran

   Seorang individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan, hasilnya adalah konflik peran *(role conflict).* Konflik ini muncul ketika seorang individu menemukan bahwa untuk memenuhi syarat satu peran dapat membuatnya lebih sulit untuk memenuhi peran lain.

2.2.2. Peran Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD)

Mengatasi masalah Bencana di daerah, BBPD sebagai Lembaga Kebencanaan daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan penangulangan bencana. Berdasarkan UU RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mengenai tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana maka, sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Pemerintah membentuk Badan Penanggulangan Bencana di tingkat nasional (BNPB) dan pada pasal 18 ayat (1) Pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana di tingkat daerah (BPBD).

Kemudian pada pasal 25 tercantum mengenai ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja BPBD diatur dengan peraturan daerah. BPBD adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan peraturan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan (Republik, 2007).

BPBD menurut UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 19, terdiri atas unsur pengarah penanggulangan bencana dan pelaksana penanggulangan bencana. Kedua unsur tersebut kemudian diuraikan pada pasal 22 dan 23 menyatakan bahwa unsur pengarah penanggulangan bencana mempunyai fungsi merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sementara unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. BPBD dibentuk agar penanggulangan bencana dapat diselesaikan secara menyeluruh sebagai perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan resiko (Dacosta, 2022).

BPBD Kabupaten Flores Timur merupakan Lembaga pemerintah yang dibentuk khusus untuk menangani permasalahan bencana serta berperan sebagai perangkat daerah dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Flores Timur. Pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur di bawah pimpinan Bupati membentuk BPBD untuk mengelola upaya penanggulangan bencana secara komprehensif. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan pasal 5 UU No. 24 Tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada awalnya menerbitkan Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik, peraturan tersebut kemudian direvisi melalui Peraturan daerah Kabupaten Flores Timur No. 3 Tahun 2022 secara khusus mengatur tugas pokok dan fungsi BPBD dalam penanggulangan bencana, yaitu sebagai berikut (Comission, 2022):

Bagian Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1), yang dimaksud dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah seperangkat daerah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

Bagian tugas pokok BPBD Kabupaten Flores Timur, pada pasal (5):

1. Menetapkan pedoman dan arahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB untuk upaya penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan merata;
2. Menyusun dan menetapkan standarnisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan mengkomunikasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur baku penanggulangan bencana;
5. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di wilayah daerah;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Pemerintah Daerah setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat terjadi keadaan tanggap darurat bencana;
7. Mengendalikan proses pengumpulan, penyaluran dana dan barang bantuan;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Fungsi BPBD Kabupaten Flores Timur, pasal (6):

Untuk melaksanakan tugas-tugas diatas BPBD Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, serta penanganan pengungsi yaitu bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. Melaksanakan kegiatan lainnya berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan petunjuk dan arahan Bupati Flores Timur.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Unsur pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur, menyelenggarakan Fungsi pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksana;

2.2.3. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Mengatasi beragam masalah bencana di Indonesia Pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan perundangan dan program penanggulangan bencana (Nurjanah, et al.,2013:98). Secara umum kebijakan nasional penanggulangan bencana terdapat dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, PP No. 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Masih halnya menurut Nurjanah et al. (2013:98) menjelaskan, “Kebijakan penanggulangan

bencana juga dapat berupa peraturan Kepala BNPB, Peraturan Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana". Dengan ditetapkan Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam UU No. 24 Tahun 2007 serta PP No. 21 Tahun 2008 sebagai payung hukum dalam penanggulangan masalah bencana di Indonesia. Di dalam UU tersebut tidak hanya dikenal istilah Manajemen Bencana *(Disaster Manajemen)*, melainkan *Penyelenggaraaan Penanggulangan Bencana*, yang di dalam bahasa Inggris juga disebut *Disaster Management.*

Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya mengatur tentang berbagai kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana, yang meliputi pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana (Oda et al., 2025). Penyelenggaraan penangulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan Pemulihan (Khorram-Manesh & Goniewicz, 2026).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaraanya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana (Republik Indonesia, 2008).

2.2.4. Tahapan manajemen Bencana

Menurut Soehatman Ramli (2010:31), tahapan manajemen bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakulan untuk mengelolah bencana dengan baik dan aman melalui 3 (tiga) tahapan yakni pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pra Bencana

   Tahapan manajemen bencana pada kondisi sebelum kejadian atau pra bencana meliputi kesiagaan, peringatan dini, dan mitigasi.

   a. Kesiagaan

      Kesiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Membangun kesiagaan adalah unsur penting, namun tidak mudah dilakukan karena menyangkut sikap mental dan budaya serta disiplin di tengah masyarakat. Dikatakan strategis karena sangat menentukan ketahanan masyarakat dalam menghadapi datangnya suatu bencana.

   b. Peringatan Dini

      Peringatan dini adalah langkah yang diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarat tentang bencana yang akan terjadi sebelum kejadian seperti banjir, gempa bumi, letusan gunung api, stunami atau badai. Peringatan dini disampaikan segera kepada semua pihak, khususnya mereka yang potensi terkena bencana dan kemungkinan datangnya suatu bencana. Peringatan didasarkan

berbagai informasi teknis dan ilmiah yang dimiliki, diolah atau diterima mengenai kemungkinan datangnya suatu bencana.

c. Mitigasi Bencana

Menurut Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana.

2. Saat Kejadian Bencana

Tahapan paling krusial dalam sistem manajemen penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah saat bencana sesunggunya terjadi melalui langkah-langkah seperti tanggap darurat dan penanggulangan bencana. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah seperti tanggap darurat untuk dapat mengatasi dampak bencana dengan cepat dan tepat agar jumlah korban atau kerugian dapat diminimalkan.

a. Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana (response) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan saran dan prasarana. Tanggap darurat

adalah tindakan segera yang dilakukan untuk mengatasi kejadian bencana. Tindakan ini dilakukan oleh tim penanggulangan bencana yang dibentuk dimasing-masing daerah atau organisasi.

Menurut PP No. 11, langkah-langkah yang dilakukan dalam kondisi tanggap darurat antara lain:

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokas, kerusakan, dan sumberdaya, sehingga dapat diketahu dan diperkirakan magnitude bencana, luas area yang terkena dan perkiraan tingkat kerusakannya;
2. Penentuan status keadaan darurat bencana;
3. Berdasarkan penilaian awal dapat diperkirakan tingkat bencana dan ditentukan status keadaan darurat. Jika tingkat bencana sangat besar dan berdampak luas, mungkin bencana tersebut dapat digolongkan sebagai bencana nasional;
4. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

Langkah berikutnya adalah melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Kemungkinan besar bencana tersebut menimbulkan korban yang dapat segera ditemukan, namun tidak jarang pula korban terjebak atau tertimbun reruntuhan sehingga diperlukan upaya keras untuk dapat menyelamatkannya.

1. Pemenuhan kebutuhan dasar

   Dalam kondisi bencana, kemungkinan besar semua sarana umum, sanitasi dan logistik mengalami kehancuran atau

sekurangnya terputus. Untuk itu, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah memberikan layanan kebutuhan dasar seperti pangan dan papan.

2. Pelindungan terhadap kelompok rentan

   Salah satu prioritas dalam penyelamatan korban bencana adalah kelompok kategori rentan, misalnya anak-anak, orang tua, cacad, pasien di rumah sakit, dan kaum lemah lainnya. Mereka perlu dibantu terlebih dahulu dan dievakuasi ke tempat yang lebih aman sehingga tidak menambah jumlah korban bencana.

3. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

   Tim tanggap darurat juga bertugas untuk segera memulihkan kondisi prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana seperti saluran air minum, listrik, dan telepon. Sarana vital ini sangat menentukan dalam men-dukung upaya pemulihan dan penyelamatan korban bencana.

b. Penanggulangan Bencana

Selama kegiatan tanggap darurat, upaya yang dilakukan adalah menanggulangi bencana yang terjadi sesuai dengan sifat dan jenisnya. Penanggulangan bencana memerlukan keahlian dan pendekatan khusus menurut kondisi dan skala kejadian. Tim tanggap darurat diharapkan mampu menangani segala bentuk bencana. Oleh karena itu tim tanggap darurat harus diorganisir dan dirancang untuk dapat menangani berbagai jenis bencana.

3. Pasca Bencana

Setelah bencana terjadi dan setelah proses tanggap darurat dilewati, maka langkah berikutnya adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

a. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Di tingkat industri atau perusahaan, fase rehabilitasi dilakukan untuk mengembalikan jalannya operasi perusahaan seperti sebelum bencana terjadi. Upaya rehabilitasi misalnya memperbaiki peralatan yang rusak dan memulihkan jalannya perusahaan seperti semula.

b. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana. baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Proses rekonstruksi tidak mudah dan memerlukan upaya keras dan terencana.

2.2.5. Bencana Erupsi Gunung Berapi

Bencana merupakan rangkaian peristiwa disruptif yang menyebabkan gangguan signifikan terhadap fungsi normal suatu komunitas atau masyarakat, mengakibatkan kerugian dan dampak luas pada aspek manusia, material, ekonomi, dan lingkungan yang melampaui kemampuan pihak yang terdampak. Bencana alam pada umumnya sulit diprediksi dan dihindari, baik dari segi waktu maupun jenis kejadiannya (Eriska, 2024). UU No. 24 Tahun 2007 pada Pasal (1) angka 1 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Bencana disebabkan, baik oleh faktor alam, non alam serta faktor manusia mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Menurut Faturahman (2021), bencana dapat dibagi menjadi dua kategori utama Pertama bencana alam yang terjadi karena faktor alam. Contoh bencana alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kategori kedua adalah bencana sosial, yaitu bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti konflik sosial, penyakit sosial, dan serangan teroris.

Gunung api adalah formasi geologis berupa lubang kepundan atau rekahan pada kerak bumi yang menjadi tempat keluarnya magma, gas atau cairan lainya ke permukaan bumi. Terbentuknya melalui proses

vulkanisme yang telah berlangsung selama jutaan tahun hingga sekarang, proses ini melibatkan pergerakan material magma dari dalam bumi ke permukaan. Pergerakan magma ke permukaan bumi tidak terjadi tanpa sebab, salah satu faktor utamanya adalah peristiwa subduksi antara dua lempeng tektonik yang menyebabkan melelehnya material batuan pada kerak bumi, kemudian bergerak ke permukaan karena memiliki berat jenis yang lebih rendah, proses yang dikenal sebagai undasi.

Gunung api aktif didefinisikan sebagai gunung yang masih menunjukan aktivitas vulkanik seperti letusan atau erupsi. Aktivitas gunung api terbagi menjadi dua kategori utama yaitu antara lain:

1.) Aktivitas vulkanik, adalah proses naiknya magma dari dalam gunung ke permukaan bumi
2.) Aktivitas non-vulkanik, fenomena alam di sekitar gunung api yang tidak secara langsung terkait dengan pembentukan gunung api, seperti; sumber air panas *(geyser)* yang berasal dari air magma dalam bentuk gas yang naik ke permukaan dan berubah menjadi cair ketika suhunya menurun; Solfatar berupa endapan belerang di sekitar lubang kepundan; fumarol, berupa uap panas dan kering yang dilepaskan melalui lubang kepundan.

Letusan gunung berapi atau yang dikenal juga sebagai erupsi, merupakan fenomena bencana alam yaitu keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan. Karakteristik keluarnya magma ini beragam variasinya pada setiap gunung api. Dikutip dari (Nazila, 2022), terdapat

dua klasifikasi utama erupsi, yaitu efusif dan eksplosif. Pada erupsi efusif lava keluar secara bertahap dan membentuk aliran, sedangkan erupsi eksplosif ditandai dengan keluarnya lava yang disertai dengan bunyi ledakan keras, seperti yang terjadi pada erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur.

Saat terjadi erupsi, fenomena ini biasanya diikuti dengan munculnya awan panas dan abu vulkanik yang pekat, endapan abu yang pekat ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan kerusakan ekosistem lingkungan. Apabila terjadi hujan bersamaan dengan erupsi, hal ini dapat mengakibatkan terbentuknya lahar dingin, yaitu campuran material pasir dan batuan yang mengalir dengan kecepatan tinggi menuruni lereng gunung.

2.2.6. Dampak Bencana Erupsi Gunung Berapi

Dampak bencana dalam studi yang dikutip oleh (Gebrina et ai., 2024) dalam Gregor (2025), dampak bencana sangat terasa pada sebagian orang akibat kehilangan keluarga, sahabat, kehilangan tempat tinggal, dan harta benda, kehilangan akan arti dari kehidupan yang dimiliki, perpindahan tempat tinggal serta perasaan ketidakpastian karena kehilangan harapan masa depan, serta perasaan aman.

Bencana alam menimbulkan dampak kerugian yang sangat beragam bagi kehidupan seseorang serta memiliki dampak resiko yang sangat tinggi bagi publik. Oleh karena itu perlunya pendekatan terintegrasi seperti penguatan perencanaan berbasis resiko, penguatan partisipasi masyarakat,

dan pemanfaatan teknologi penanggulangan bencana dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa mendatang (Akhirianto et al, 2025).

Dampak bencana menurut Benson and Clay dalam Nurjanah (2013) dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Dampak langsung: meliputi kerugian finansial dari kerusakan asset ekonomi, misalnya kerusakan bangunan seperti tempat tinggal dan tempat usaha.
2. Dampak tidak langsung: meliputi berhentinya proses produksi, hilangnya sumber penerima yang dalam istilah ekonomi disebut *Flow value.*
3. Dampak lanjutan (sekunder): misalnya terhambatnya pertumbuhan ekonomi, tergantungnya rencana pembangunan yang telah disusun, meningkatnya angka kemiskinan dan lain-lain.

Bencana letusan gunung berapi memiliki dampak yang sangat besar keberbagai bidang kehidupan, dari segi lingkungan, letusan mengubah topografi atau bentuk permukaan tanah dan merusak ekosistem, merusak tumbuhan, tanaman dan hewan dengan aliran lava panas, menyebarkan abu vulkanik yang mempengaruhi iklim dan cuaca, serta mencemari air yang merupakan sumber kehidupan masyarakat (Rahman et al., 2026). Dari segi kesehatan, material vulkanik menyebabkan masalah pernapasan, gas berbahaya dapat menyebabkan keracunan, kontaminasi air minum oleh mineral vulkanik menimbulkan resiko kesehatan jangka panjang, belum

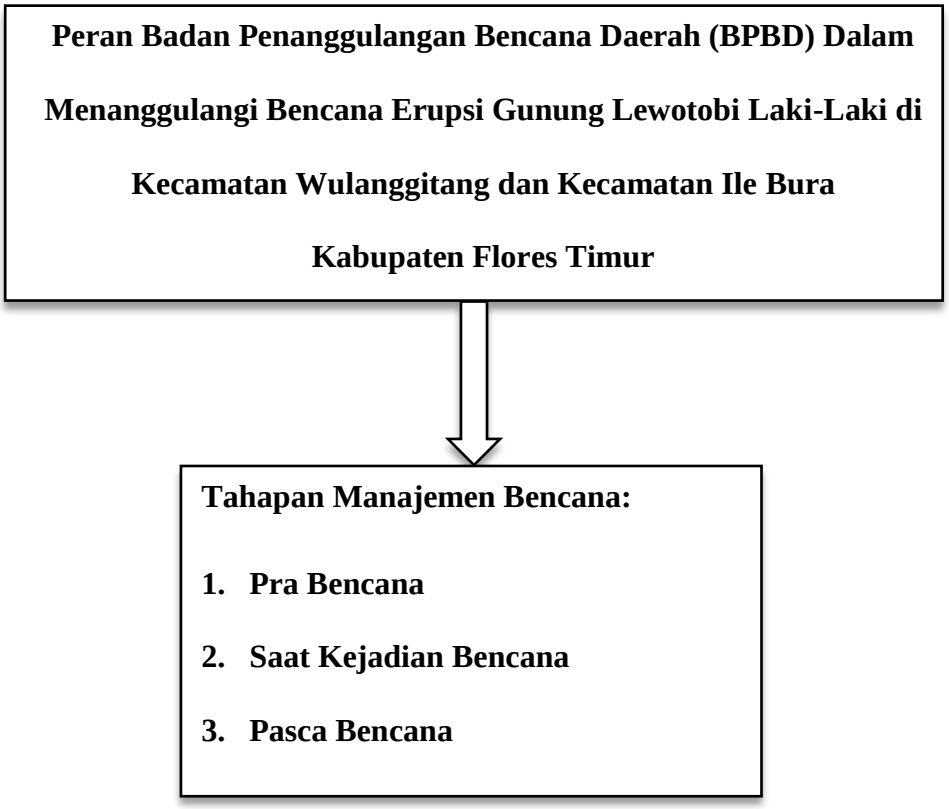
lagi trauma psikologis yang dialami oleh masyarakat terdampak, serta korban jiwa (Ruslanjari et al., 2025). Secara sosial-ekonomi kerusakan infrastruktur vital mengisolasi masyarakat, kerusakan permukiman warga terpaksa mengungsi, berdampak pada pertanian, serta biaya perbaikan (Rahman et al., 2026).

2.3. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari fakta masalah bahwa Gunung Lewotobi Laki-Laki yang terletak di Kecamatan Wulanggitang dan sebagian kecil di Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur menghalami serangkaian erupsi pada periode 2023-2025 yang menimbulkan dampak segnifikan terhadap publik (masyarakat), meliputi korban jiwa, kerugian materi, gangguan kesehatan, hingga ribuan warga harus mengungsi. Mengenai kondisi ini maka, pentingnya upaya penanggulangan bencana yang terpadu oleh BPBD Kabupaten Flores Timur sebagai lembaga yang memiliki kewenangan utama dalam penanggulangan bencana tertuang dalam Perda Kabupaten Flores Timur No. 3 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi BPBD dalam penanggulangan bencana di daerah.

Untuk mendeskripsikan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana erupsi gunung Lewotobi Laki-laki di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur, Penulis menggunakan teori penanggulangan bencana menurut Soehatman Ramli (2010), terdiri dari 3 (tiga) tahapan yakni Pra Bencana, Saat Bencana, dan Pasca Bencana.

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berpikir



Sumber: review penulis bedasarkan pendapat Soehatman Ramli (2010).